

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Institutional Theory***

Teori Institusional (Institutional Theory) Institutional theory merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Dalam perkembangannya, institutional theory terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu old-institutional theory (OIT) dan new institutional theory (NIT). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena adanya nilai (values), norma (norms) dan perilaku (attitudes) yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan classifications, routines, scripts, schema (Powell & DiMaggio, 1991).

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, para aktor yang dalam hal ini adalah para penyusun laporan tahunan di lingkungan K/L sebenarnya berada dalam satu lingkungan peraturan yang sama. Namun praktik penyusunan dan publikasi laporan tahunan ini kemudian menjadi berbeda karena masing-masing aktor memiliki logika yang berbeda yang dipengaruhi oleh classifications, routines, scripts, schema di lingkungan K/L masing-masing. Selain itu,

perbedaan logika aktor mungkin dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari luar seperti tekanan politik dari lembaga tertentu, keputusan yang diambil oleh aktor lain dan tuntutan profesionalisme dari stakeholder.

Pada penelitian kali ini peneliti akan berusaha menekankan pada isomorfisme koersif yaitu tekanan eksternal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Pada sektor pemerintahan banyak sekali peraturan perundangundangan yang mengatur proses pelaporan keuangan secara teknis (Budiawan dan Budi, 2104). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi (Chodijah, 2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah biasanya dinilai dari opini yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria. (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektifitas sistem pengendalian internal (SPI) (Chodijah, 2018).

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Ihsanti,2014). Selanjutnya, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi –transaksi

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Menurut Rahayu et al, (2014) Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

### **2.2.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber -sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang -undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

#### **2.2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, dkk.2012).

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi,

bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. (Mahmudi, 2007).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Indriasari dkk, 2008). Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (visible) dan relative berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah

kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

#### **2.2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat / daerah jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dilingkungan pemerintahan pusat / daerah jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan, menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kegunaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

### **2.2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi semakin lama semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. “Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi” (Laudon, 2006: 174). Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dimana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meliputi perangkat keras dan perangkat lunak saja namun juga meliputi : komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet,intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Menurut Widyaningrum (2010) Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian ekonomi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unitkerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi.

## Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Data Reserch GAP

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<p><b>Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari (2020)</b>  Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang</p>	<p>X1 :Standar Akuntansi Pemerintah  X2 :Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah  X3 :Sistem Pengendalian Internal  Y1 :Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah, dan system pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan  2. Pemahaman SAP secara parsial berpengaruh positif signifikan  3.Pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan  4.Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan.</p>
2.	<p><b>Luthfi Shafwan Halim (2020)</b>  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Karanganyar)</p>	<p>X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia  X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)  X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi  X4 : Sistem Pengendalian Intern  Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan  2. Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh  3. Pemanfaatan teknologi informsasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  4.Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh  5. Kompetensi sumber daya manusia,</p>

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara simultan atau bersama-sama berpengaruh.
3..	<p><b>Wisnu Satrio Wisaksono (2018)</b>  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar)</p>	X1 :Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 :Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) X3 :Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Y :Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) berpengaruh positif signifikan 2.Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh Positif 3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh Positif signifikan
4.	<p><b>Tut Madiguna Agung, Gayatri (2018)</b>  Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem</p>	X1 : Gaya Kepemimpinan X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 :Sistem Pengendalian Intern X4 : Komitmen Organisasi X5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y1 : Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	1. Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian intern, Komitemen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5.	<b>Rizki Afri Mulia (2018)</b> Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Sistem Pengendalian Intern Y1 : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif 2.. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
6.	<b>Syarifah Hannum Hasibuan (2018)</b> Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Padang Lawas)	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) X3 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas, Sedangkan penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas 2. Secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan system akuntansi keuangan daerah Berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
7.	<b>Khoirina Kencana Ningrum (2018)</b> Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	X1 : Komptensi Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Komptensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak berpengaruh secara signifikan 3. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh positif dan signifikan
8.	<b>Riedy Riandani (2017)</b> Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknolog Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota)	X1 : Kompetensi SDM X2 : Pemanfaatan Teknolog Informasi X3 : Pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan	1. Kompetensi SDM Berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Pemanfaatan Teknolog Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
9.	<b>Raja Yoga Gustika Armel (2017)</b> Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota	X1 : Sumber Daya Manusia X2 : Standar Akuntansi Pemerintah X3 : Teknologi Informasi X4 :Pengendalian Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1.Kompetensi SDM berpengaruh Positif 2. Penerapan standar akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif 3. Pemanfaatan teknologi informasi Berpengaruh Positif 4.Sistem pengendalian intern Berpengaruh Positif .

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Dumai)		
10.	<b>Surya Adhitama (2017)</b> Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( <i>Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir</i> )	X1 : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) X2 : Sistem AkuntansiKeuangan Daerah (SAKD) X3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif.. 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif.
11.	<b>Putriasri Pujanira (2017)</b> Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Standar Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif. 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif. 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif.
12	<b>Harlinda (2016)</b> Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah	X1 : Sumber Daya Manusia X2 : Teknologi Informasi X3 : Pengendalian Intern Akuntansi X4 : Komitmen	1. Sumber daya manusia berpengaruh 2. Teknologi informasi berpengaruh 3. Pengendalian intern akuntansi 4. Komitmen

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Kabupaten / Kota di Provinsi Riau)	Organisasi X5 : Pemahaman Akuntansi X6 : Faktor Eksternal Y1 : kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	organisasi tidak berpengaruh. 5. Pemahaman akuntansi berpengaruh 6. Faktor eksternal berpengaruh
13.	<b>Noprial Valenra Maksyur (2015)</b> Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	X1 : Kualitas Sumber Daya Manusia X2 : Komitmen Organisasi X3 : Sistem Pengendalian Intern X4 : Pemanfaatan Teknologi informasi Y : Kualitas Laporan keuangan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 2. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 4. Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
14.	<b>Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)</b> Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X1 : Kompetensi SDM X2 : Penerapan SAP X3 : Sistem Akuntansi Keuangan Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan 2. SAP berpengaruh positif dan signifikan 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh positif dan signifikan 4. Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan

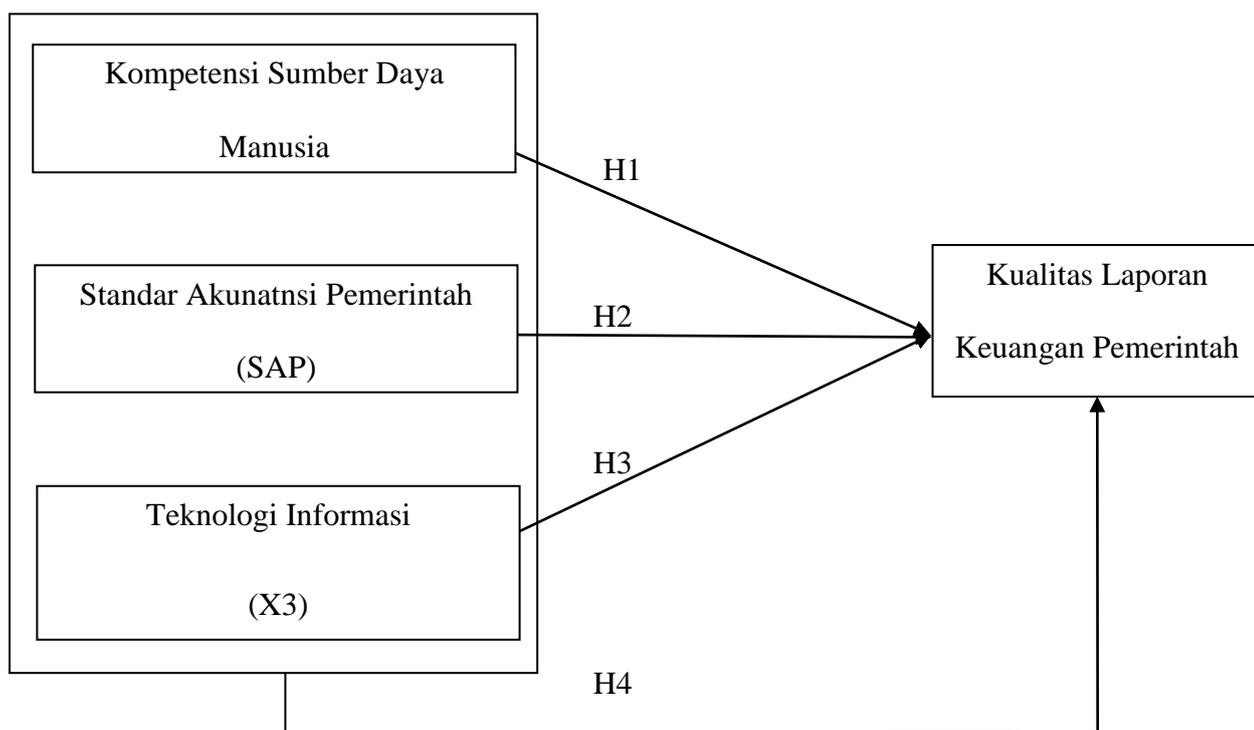
No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
15.	<b>As syifa Nurillah (2014)</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok)	X1 : Sumber Daya Manusia X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) X3 : Teknologi Informasi X4 : Pengendalian Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1.Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
16.	<b>Muhammad Rifky Alamsyah, Sri Rahayu, Muhamad Muslih (2014)</b> Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok)	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) X3 : Teknologi Informasi X4 : Sistem Pengendalian Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1 . Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif 2. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif 3.Penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif. 4.Pemanfaatan TI signifikan positif 5.Sistem Pengendalian Internal signifikan positif

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan variabel dependennya adalah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori - teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia sangat terkait dengan kinerja yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya keahlian yang dimiliki serta

rendahnya kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dikhawatirkan akan adanya kekeliruan pada proses penyusunan laporan keuangan tersebut (Soimah, 2014). Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Azhar, 2007). Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Mempelajar kompetensi sumber daya manusia adalah upaya mempelajari peran SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi potensial dan pengembangan potensi karyawan.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Herlinda (2016) menyatakan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Adhitama (2017) menyatakan bahwa Pegaaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi

Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Roviyantri (2011) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal standar akuntansi yang diterapkan. Sehingga itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2017) menyebutkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Teknologi Informasi yang semakin maju akan memberikan dampak positif jika dapat dimanfaatkan secara baik. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Pemerintah jugawajib menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai serta membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam Penelitian yang dilakukan Maksyur (2015) menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dan Penelitian yang dilakukan Agung (2018) menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD) merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.